

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa dalam menyalurkan alokasi dana desa talumopatu terdapat tiga aspek penting yakni tahap pra penyaluran Tahap Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa serta Tahap Pasca Penyaluran dana desa, Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Talumopatu masih belum berjalan dengan baik terutama pada tahap pra penyaluran dan tahap penyaluran dan penggunaan dana desa, hanya tahap ketiga yang telah terlaksana dengan baik, tetapi Tahap Pra Penyaluran Dana Desa masih belum terlaksana dengan baik terutama pada Aspek Kesesuaian Prosedur Penyusunan Perencanaan Dana Desa karena kepala desa tidak membuat surat keputusan tentang Petugas Teknis Pelaksana Dana Desa (PTPD) tapi hanya melakukan penunjukan langsung kepada sekretaris desa.

Kemudian pada factor penghambat di temukan tiga factor yang sangat berpengaruh terhadap penyaluran dana desa talumopatu pertama factor pendidikan, factor lemahnya pengawasan dan terakhir factor pencairan. ketiga faktor ini memberikan dampak yang begitu sulit terhadap kinerja kepala desa yang menjadi kepala dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa di desa Talumopatu.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa di Kecamatan Mootilango, antara lain :

1. Aparat pemerintah desa dan anggota badan permusyawaratan desa seharusnya memiliki intergrasi yang baik sehingga pengawasan dana desa dapat berjalan dengan baik.
2. Kejelasan prosedur pengawasan dana harus di perhatikan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta masyarakat sehingga dana desa dapat diawasi dengan baik.
3. Anggota badan permusyawaratan desa sebaiknya memberikan ketegasan kepada pemerintah desa agar sebelum mengimplementasikan program yang didanai oleh alokasi dana desa harus ada musyawarah penentuan program prioritas sehingga dapat tercipta keselarasan antara pemerintah desa, anggota badan permusyawaratan rakyat, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.W. Widjaja, 2014, *Otonomi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penilitan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansyah, 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Jakarta.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Interpena, Yogyakarta.
- Inu Kencana Syafiie, 2012, *Ilmu Negara Dalam Perspektif Islam*, Sarana Pariwisata, Semarang.
- Mashuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, PolGov, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- R. Brunetta Wolfman, 2008, *Peran Kaum Wanita*, Kanisius, Yogyakarta.
- Riyadi, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penilitan Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2001, *Sosiologi sebagai pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Tatang M. Amirin, 2000, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013, Medan, Bitra Indonesia.

Skripsi & Jurnal

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, Vol I, No.6.

Skripsi, Hairil Sakthi HR, Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, Universitas Hasanudin.

Skripsi, Sri Yumisna Baga, Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pemasangan Alat peraga kampanye pada pemilu Legislatif 2014 di Provinsi Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo.

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/desa>

<http://expresisastra.blogspot.com>

[http://www.banyumaskab.go.id./read/1355/kebijakan-alokasi-dana-desa-add-dan – penguatan-otonomi-desa](http://www.banyumaskab.go.id./read/1355/kebijakan-alokasi-dana-desa-add-dan-penguatan-otonomi-desa). Diakses

<http://www.dawuantimur.com/2015/01/fungsi-dan-wewenang-badan-permusyawaratan-desa>.